



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)**



JL. KYAI JEBAT NO. 881 A DEMAK TELP (0291) 685660

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2024 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026 yang diturunkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2021–2026 sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah yang pertama indeks kepuasan masyarakat dari target 90,25 tercapai 90,30 atau 100,05%, indikator kinerja yang kedua persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja ketiga nilai SAKIP BPKPAD target 82,5 untuk realisasi sampai dengan laporan ini ditulis laporan resmi belum keluar, indikator kinerja yang keempat persentase indikator kinerja strategis BPKPAD yang mencapai target 100% realisasi 102,63% capaian 100%, indikator kinerja yang kelima hasil opini BPK target WTP Realisasi WTP prosentase 100%, Indikator Kinerja Yang Keenam Persentase Tata Kelola Keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan target 100% realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja yang ketujuh derajat otonomi fiskal target 18 realisasi 22 capaian 122%, indikator kinerja yang kedelapan persentase perangkat daerah yang mampu mengelola aset dengan baik target 100% realisasi 100% capaian 100%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Demak,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP.197806192003121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1

 B.ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

 A.RENCANA STRATEGIS 10

 B.RENCANA KINERJA TAHUNAN 12

 C.PERJANJIAN KINERJA..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024 21

 A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 22

 B.REALISASI ANGGARAN 89

BAB IV PENUTUP..... 97

 A.Simpulan 97

 B.Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang..... 99

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dengan Visi sebagaimana Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu “Demak bermartabat maju dan sejahtera”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memiliki 3 (Tiga) Misi, adapun Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan misi ke-1 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis kondusif dan berbudaya”.

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan alat ukur Indikator Kinerja baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik BPKPAD
Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat target 90,25 tercapai 90,30 atau 100,05%
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang renponsif
Indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% realisasi 100% capaian 100%
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah
Indikator Kinerja Nilai SAKIP BPKPAD target 82,5%, realisasi sampai dengan laporan ini disusun secara resmi belum keluar.
4. Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD
Indikator Kinerja Nilai Persentase indikator kinerja sasaran startegis BPKPAD yang mencapai target 100% realisasi 102,63% capaian 102,63%
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Indikator Kinerja Opini BPK target WTP Realisasi WTP prosentase 100%
6. Terwujudnya tata kelola keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal
Indikator Kinerja 6.1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan target 100% realisasi 100% capaian 100%
Indikator Kinerja 6.2.Derajat Otonomi Fiskal target 18 realisasi 22 capaian 122%
Indikator Kinerja 6.3. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik target 100% realisasi 100% capaian 100%

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2024 dari Pagu Rp. 468.921.975.793,- dapat terealisasi sebesar Rp. 462.743.675.988 atau 98,68% ini menunjukkan kinerja keuangan sangat baik.

BAB I PENDAHULUAN

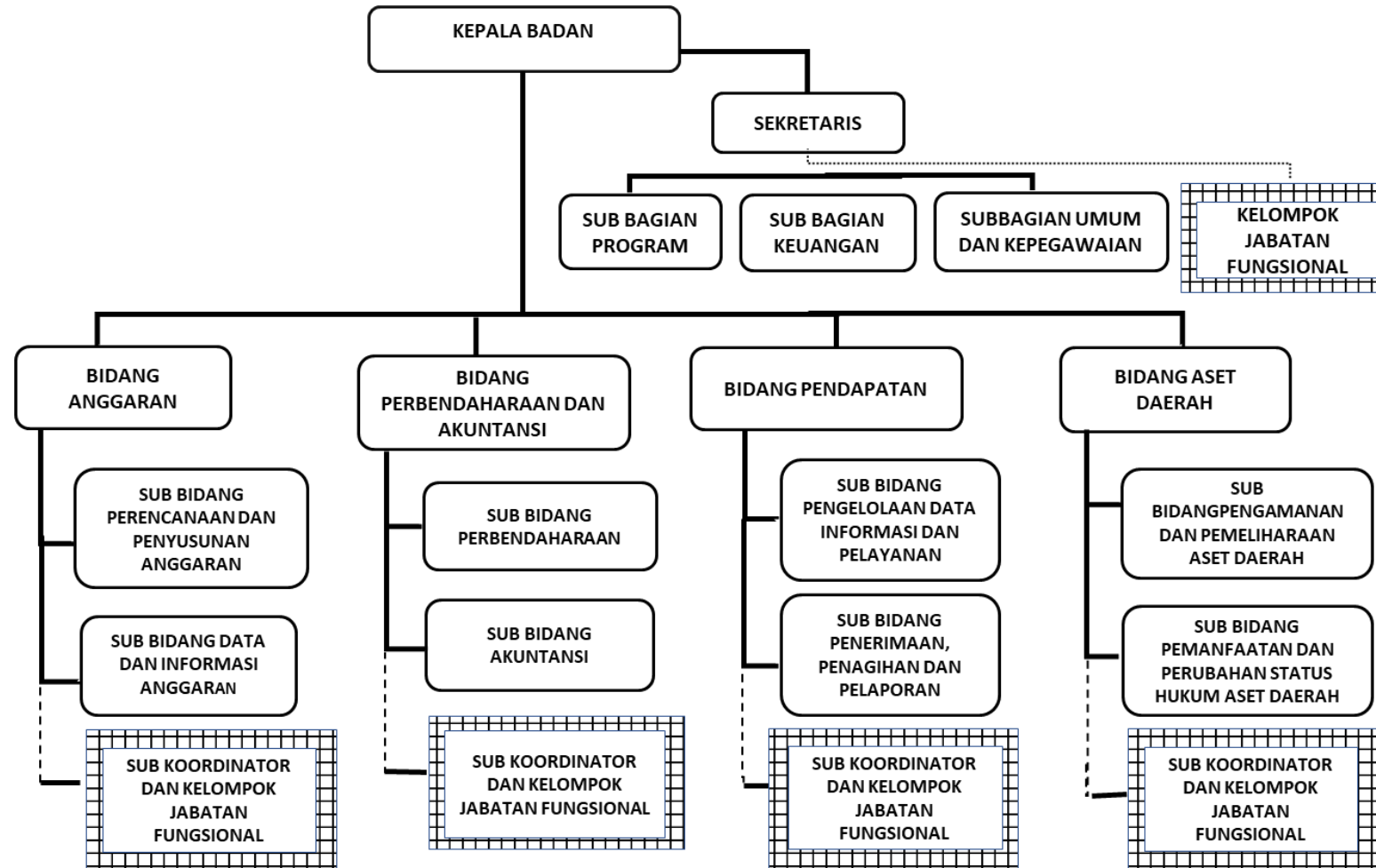
A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, sesuai Bagian Kedua Pasal 3 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai Bagian Ketiga Pasal 4 mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TABEL 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
DEMAK



Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran;
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi;
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pendapatan
 1. Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Aset Daerah
 1. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah;
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

1). Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak di klasifikasikan ke dalam komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPKPAD Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	5	3	5	2	15
3	D2	-	-	-	-	0
4	D3	4	3	-	2	9
5	D4	-	-	-	-	0
6	S1	7	12	9	6	34
7	S2	13	6	-	1	20
8	S3	-	-	-	-	0
	Jumlah	29	24	15	11	79

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Dari jumlah pegawai sebanyak 79 orang terdiri ASN 53 atau (67%) dan Non ASN 26 atau (33%). Jumlah 53 ASN tersebut jumlah laki-laki sebanyak 29 orang atau 55% dan perempuan sebanyak 24 orang atau 45% sedangkan dari jumlah Non ASN 26 orang terdiri laki-laki 15 orang atau 58% dan perempuan 11 orang 42%. Kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai ASN berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel 1.3. berikut:

Tabel.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	7	3	10
2	Golongan III	13	13	26
3	Golongan IV	6	2	8
4	Ahli Pertama	1	6	7
5	Trampil	2	-	2
	Jumlah	29	24	53

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah pegawai BPKPAD yang berstatus ASN. Dari jumlah 53 pegawai tersebut 29 orang atau 55% laki-laki dan 24 atau 45% orang perempuan.

2) Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2024. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada table 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana-Prasarana di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Demak 2024

<i>No.Urut</i>	<i>Jenis Barang>Nama Barang</i>	<i>Tahun Pengadaan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Keterangan</i>
1	2	3	4	5
1	-Tanah Bangunan Kantor	1975	1200 m ²	Baik
2	-Bangunan Gedung Permanen	2020	1200 m ²	Baik
3	Gedung Parkir	2008	192 m ²	Baik
4	Gedung Parkir Terbuka	2023	272 m ²	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 4	2014	2 Unit	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 4	2016	4 Unit	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 4	2018	2 Unit	Baik
8	Kendaraan Dinas Roda 4	2019	1 Unit	Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 4	2020	1 Unit	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	4 Unit	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	5 Unit	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 2	2011	4 Unit	Baik
13	Kendaraan Dinas Roda 2	2012	4 Unit	Baik
14	Kendaraan Dinas Roda 2	2018	1 Unit	Baik
15	Kendaraan Dinas Roda 2	2019	4 Unit	Baik
16	Kendaraan Dinas Roda 2	2020	6 Unit	Baik
17	Gen Set	2013	1 Unit	Baik
18	Gen Set	2016	1 Unit	Baik
19	Gen Set	2019	1 Unit	Baik
20	Gen Set	2020	1 Unit	Baik
21	Server	2010	2 Unit	Baik
22	Server	2015	4 Unit	Baik
23	Server	2016	4 Unit	Baik
24	Server	2018	2 Unit	Baik
25	Server	2020	4 Unit	Baik
26	PC Unit	2010	5 Unit	Baik
27	PC Unit	2011	10 Unit	Baik
28	PC Unit	2012	5 Unit	Baik
29	PC Unit	2015	8 Unit	Baik

No.Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah barang	Keterangan
1	2	3	4	5
30	PC Unit	2017	4 Unit	Baik
31	PC Unit	2018	5 Unit	Baik
32	PC Unit	2019	14 Unit	Baik
33	PC Unit	2020	8 Unit	Baik
34	Notebook/Laptop	2010	4 Unit	Baik
35	Notebook/Laptop	2012	4 Unit	Baik
36	Notebook/Laptop	2014	6 Unit	Baik
37	Notebook/Laptop	2015	4 Unit	Baik
38	Notebook/Laptop	2017	3 Unit	Baik
39	Notebook/Laptop	2018	7 Unit	Baik
40	Notebook/Laptop	2019	9 Unit	Baik
41	Notebook/Laptop	2020	4 Unit	Baik
42	LCD Proyektor	2010	2 Unit	Baik
43	LCD Proyektor	2012	1 Unit	Baik
44	LCD Proyektor	2015	2 Unit	Baik
45	LCD Proyektor	2018	2 Unit	Baik
46	LCD Proyektor	2019	1 Unit	Baik
47	Roll Opec/Filing Besi	2011	2 Unit	Baik
48	Roll Opec/Filing Besi	2012	1 Unit	Baik
49	Roll Opec/Filing Besi	2014	2 Unit	Baik
50	Roll Opec/Filing Besi	2016	2 Unit	Baik
51	Roll Opec/Filing Besi	2018	4 Unit	Baik
52	Roll Opec/Filing Besi	2019	5 Unit	Baik
53	Lemari Kayu	2010	8 Unit	Baik
54	Lemari Kayu	2011	5 Unit	Baik
55	Lemari Kayu	2014	10 Unit	Baik
56	Lemari Kayu	2017	4 Unit	Baik
57	Lemari Kayu	2018	6 Unit	Baik
58	Lemari Kayu	2019	5 Unit	Baik
59	Rak Besi	2015	5 Unit	Baik
60	Rak Besi	2018	4 Unit	Baik
61	Rak Besi	2019	6 Unit	Baik
62	Rak Kayu	2010	2 Unit	Baik
63	Rak Kayu	2013	6 Unit	Baik
64	Rak Kayu	2015	2 Unit	Baik
65	Rak Kayu	2016	2 Unit	Baik
66	Rak Kayu	2019	4 Unit	Baik
67	Lemari Kaca	2018	2 Unit	Baik
68	Lemari Kaca	2019	4 Unit	Baik
69	Lemari Kaca	2020	2 Unit	Baik
70	Porforator	2017	2 Unit	Baik
71	Porforator	2019	2 Unit	Baik
72	Lemari ES/Kulkas	2012	2 Unit	Baik
73	Lemari ES/Kulkas	2015	2 Unit	Baik
74	Lemari ES/Kulkas	2017	1 Unit	Baik
75	AC	2010	7 Unit	Baik

No.Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah barang	Keterangan
1	2	3	4	5
76	AC	2012	5 Unit	Baik
77	AC	2015	10 Unit	Baik
78	AC	2017	4 Unit	Baik
79	AC	2018	7 Unit	Baik
80	AC	2019	5 Unit	Baik
81	Kipas Angin	2010	4 Unit	Baik
82	Kipas Angin	2017	2 Unit	Baik
83	Kipas Angin	2018	4 Unit	Baik
84	TV Kantor	2010	4 Unit	Baik
85	TV Kantor	2012	7 Unit	Baik
86	TV Kantor	2015	4 Unit	Baik
87	TV Kantor	2018	6 Unit	Baik
88	TV Wisma	2020	18 Unit	Baik
89	Filing Device	2020	4 Buah	Baik
90	Thermo Gun	2020	3 Unit	Baik
91	Penyemprot Otomatis	2020	2 Unit	Baik
92	Sound System	2022	1 Set	Baik
93	Apar	2022	3 Unit	Baik
94	Finger Print	2022	2 Unit	Baik
95	Soft Ware Aplikasi	2022	1 Set	Baik
96	Server	2022	1 Unit	Baik
97	Accessories	2022	1 Set	Baik
98	Aplikasi	2022	2 Set	Baik
99	1 Paket Audio Visual	2022	3 Set	Baik
100	All In One	2022	1 Unit	Baik
101	Lemari Kaca	2022	1 Unit	Baik
102	All in One	2023	2 Unit	Baik
103	Printer	2023	4 Unit	Baik
104	UPS	2023	2 Unit	Baik
105	LCD Proyektor	2023	1 Unit	Baik
106	Gedung Parkir Terbuka	2023	272 m ²	Baik
107	Kursi Besi/Metal	2023	7 Unit	Baik
108	Kursi Putar	2023	2 Unit	Baik
109	Kursi Pejabat	2023	1 Unit	Baik
110	Monitor	2023	2 Unit	Baik
111	Camera Zoom	2023	1 Unit	Baik
112	Alat Penyimpanan Kantor Lainnya	2023	1 Unit	Baik
113	Mesin Penghancur Kertas	2024	1 Unit	Baik
114	Kendaraan Dinas Roda 2	2024	8 Unit	Baik
115	AC	2024	7 Unit	Baik
116	Handphone	2024	2 Unit	Baik
117	PC AIO	2024	9 Unit	Baik
118	Notebook/Laptop	2024	2 Unit	Baik
119	Monitor	2024	2 Unit	Baik
120	Printer	2024	8 Unit	Baik
121	Switcher	2024	2 Unit	Baik

No.Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah barang	Keterangan
1	2	3	4	5
122	UPS	2024	6 Unit	Baik
123	Tenis Meja	2024	1 Unit	Baik
125	Bench	2024	1 Unit	Baik
126	Alat Gym 3 in 1	2024	1 Unit	Baik
127	Dumbell Set	2024	1 Unit	Baik
128	Sepeda Statis	2024	1 Unit	Baik
129	Alat Treadmill	2024	4 Unit	Baik
Jumlah			461 Unit	Baik

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

3) Fungsi Strategis BPKPAD Kabupaten Demak

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam RPJMD melaksanakan misi kesatu yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis kondusif dan berbudaya , dengan tujuan dalam RPJMD yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya Sasaran yang akan dicapai adalah pertama

meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan indikator sasaran nilai IKM daerah kedua meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator pertama nilai SAKIP daerah dan indikator kedua Indek Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat tiga sasaran dalam renstra BPKPAD Kabupaten Demak yang ingin dicapai yaitu :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif.
- 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD.
- 3. Terwujudnya tata kelola keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal.

B. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa permasalahan tahun sebelumnya yang perlu diselesaikan di tahun 2024 diantaranya:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan sehingga dalam membiayai program dan kegiatan bisa tercukupi dengan anggaran yang memadai. Selain itu sumber pendapatan daerah Kabupaten Demak masih banyak dibiayai dari sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih ada wajib pajak yang tidak taat pajak.
3. Intensitas Pergantian Pengurus Barang yang terlalu sering
4. Sulitnya mencari bukti dukung yang kuat dan lengkap atas kepemilikan tanah.
5. Kesulitan menunjuk titik-titik batas tanah yang harus diambil menggunakan GPS.
6. Kapasitas Pengurus barang yang terbatas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1) Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu “**Demak bermartabat, maju, dan sejahtera**”.

2) Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah dalam rangka melaksanakan misi pertama dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu “**Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis kondusif dan berbudaya**”.

3) Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 Tujuan BPKPAD yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD dengan indikator tujuan Indek Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPKPAD dengan indikator tujuan Nilai Sakip BPKPAD
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan indikator tujuan Hasil Opini BPK

4) Sasaran

Berdasarkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, sasaran yang akan dicapai sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pada tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD
Memiliki indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat dengan Target 90.25.
- 2) Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif
Memiliki indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target 100%.
- 3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan dan Aset Daerah
Memiliki indikator Kinerja Nilai SAKIP BPKPAD dengan target 82.5
- 4) Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD Memiliki indikator Kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target dengan target 100%.
- 5) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Memiliki indikator kinerja hasil opini BPK dengan target WTP.
- 6) Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal
Memiliki indikator kinerja pertama persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan dengan target 100%, indikator yang kedua derajat otonomi fiskal dengan target 18 dan indikator yang ketiga persentase perangkat daerah yang mampu mengelola aset dengan baik dengan target 100%.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RKT murni dan RKT perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Bupati Demak. Adapun RKT murni dan perubahan sesuai dengan tabel 2.1.

Tabel. 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN MURNI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	85,50
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82,50
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	17,65
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Tabel.2.2
Program dan Anggaran Murni 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.327.327.868	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	414.874.747.500	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	950.000.000	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	26.927.260.180	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	462.079.335.548	

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Tabel di atas adalah sasaran dan indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan perjanjian kinerja murni. Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan dapat dilihat sesuai Tabel. 2.3.

Tabel 2.3
RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	90.25
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82.5
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	18
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Sedangkan program dan anggaran yang digunakan untuk mengintervensi rencana kinerja tahunan perubahan untuk tahun 2024 adalah sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel.2.4
Program dan Anggaran 2024 Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.679.525.940	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	418.821.031.500	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.400.000.000	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	30.021.418.353	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	468.921.975.793	

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	85.50
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82.50
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	17.65
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Dengan didukung program dan anggaran murni 2024 sebagaimana tabel 2.6

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Murni 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.327.327.868	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	414.874.747.500	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	950.000.000	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	26.927.260.180	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	462.079.335.548	

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	90.25
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82.5
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan,	Hasil opini BPK	WTP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pendapatan dan Aset Daerah		
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	18
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Tabel 2.8

Program dan Anggaran 2024 Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.679.525.940	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	418.821.031.500	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.400.000.000	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	30.021.418.353	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	468.921.975.793	

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2024 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel.3.1
Skala Pengukuran

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	90 s/d 100%	Sangat Baik
2	80 s/d 89%	Baik
3	50 s/d 79 %	Cukup Baik
4	Kurang dari 49 %	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Tabel 3.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 dok	10 dok	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 dok	3 dok	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan: dokumen(LK Tahunan))	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Dengan Satuan:OB)	48 OB	48 OB	100%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 OB	85 OB	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	100%	100%	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 org	85 org	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 org	48 org	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	62 Paket	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	32 dokumen	100%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32 dokumen	32 dokumen	100%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
pemerintah daerah				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0 paket	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	32 Unit	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	13 Unit	13 Unit	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan	5823 Laporan	194%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JAsa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan (Dengan Satuan:unit)	41 unit	41 unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8 unit	8 unit	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	100%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 unit	110 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	110 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	50 unit	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
	-Persentase Penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
	-persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	100 dok	100 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 dokumen	250 dokumen	100%
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 dok	12 dok	100%
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 dok	240 dok	100%
Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 dok	232 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 dok	42 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 laporan	36 laporan	100%
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 dok	7593 dok	152%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 org	42 org	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 dok	4 dok	100%
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 dok	4 dok	100%
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 dok	3 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	100%
Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 org	110 org	100%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dok	12 dok	100%
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	100%
Pengelolaan dana darurat mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 dok	112 dok	100%
Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dok	5 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	112 laporan	100%
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	100%
Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 laporan	25 laporan	100%
Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 dok	36 dok	100%
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 laporan	20 laporan	100%
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	5%	17%	340%
Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	526.609.633.341	594.572.486.657	113%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dok	3 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	Prosentase Capaian
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 laporan	110 laporan	100%
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60300 laporan	60300 laporan	100%
Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60143 dok	60143 dok	100%
Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 dok	480 dok	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Analisis target dan realisasi kinerja tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini ada 8 kegiatan 30 sub kegiatan dengan Indikator kinerja Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan dan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti target 2024 adalah 100% tercapai 100%. Dari 30 (tiga puluh) sub kegiatan itu ada 2(dua) sub kegiatan yaitu pengadaan mebel dan pengadaan peralatan lainnya yang pagunya kita alihkan ke sub kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor karena kedua sub kegiatan itu penganggarannya masih dapat di tunda di 2025.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada program ini ada 4 kegiatan 19 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2024 dengan indikator program yaitu Persentase penetapan APBD tepat waktu, target tepat waktu, dan dapat tercapai tepat waktu, kemudian Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP target 100% tercapai 100% dan Persentase penyampaian LKPD tepat waktu tercapai tepat waktu. Dengan demikian Capaian realisasi kinerja tahun 2024 untuk program ini tercapai dengan kategori sangat baik.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada program ini ada 1 kegiatan 11 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2024 adalah 100% telah tercapai 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 tercapai dengan kategori sangat baik.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini ada 1 kegiatan 6 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2024 adalah Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan: Persen) Target 5% telah tercapai 17 % atau 340 %. Capaian tahun 2024 target kinerja indikator program berupa tingkat pertumbuhan PAD dapat tercapai dengan maksimal hal ini sangat menggembirakan. Selain tercapainya target pertumbuhan PAD target PAD yang ditetapkan tahun 2024 sejumlah Rp. 526.609.633.341 terealisasi sebesar Rp. 594.572.486.657,42 atau sebesar 113%. Hal ini menunjukkan capaian yang sangat baik dan membanggakan.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	90.25	90,30	100.5%
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82.5	NA	NA
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100	102.63	102,63%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP	WTP	100%
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100	100	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	18	22	122%
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100	100	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Indek Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2024 dengan target 90,25 dan realisasi sebesar 90,30 atau 100,05% hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 masuk dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 2 :** Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif *dengan target indikator kinerja* Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2024 dengan target 100% tercapai 100% hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran tahun 2024 dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 3:** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* Nilai SAKIP BPKPAD. Tingkat capaian pada tahun 2024 dari target 82,5 sampai dengan kami melaporkan nilai SAKIP 2023 yang seharusnya keluar di tahun 2024 belum keluar .
- **Sasaran Strategis 4 :** Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target. Tingkat capaian pada tahun 2024 dengan target 100% tercapai 102,63% . Hal ini menunjukkan capaian strategis pada tahun 2024 dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 5 :** Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* hasil opini BPK. Tingkat capaian target 2024 tercapai dengan sangat baik yaitu target WTP tercapai WTP pula dan capaian ini pada tahun 2024 merupakan capaian WTP yang ke-8. Hal ini bagi pemerintah Kabupaten Demak merupakan suatu kebanggaan, harapannya tahun-tahun berikutnya pun WTP dapat dipertahankan dengan kualitas yang lebih bagus lagi tanpa ada catatan.
- **Sasaran Strategis 6 :** Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal untuk sasaran ke-6 ini memiliki 3 indikator kinerja. Yang pertama Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan untuk tahun 2024 tercapai 100% dari target 100%, hal ini menunjukkan capaian dalam katgori sangat baik. Untuk indikator yang kedua yaitu Derajat Otonomi Fiskal pada tahun

2024 dari target 18 tercapai 22 atau 122% hal ini menunjukkan capaian kinerjanya dalam kategori sangat baik, Dan untuk indikator yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dari target 100% tahun 2024 tercapai 100%, hal ini menunjukkan capaian kinerja dalam kategori sangat baik.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN 2023

Tabel. 3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen	100%	100%	100%
	persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah daerah	10 dok	10 dok	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dok	2 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3 dok	3 dok	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:dokumen(L K Tahunan))	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Dengan Satuan:OB)	48 OB	48 OB	100%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 OB	85 OB	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	100%	100%	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 org	85 org	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	48 org	48 org	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	62 Paket	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	32 dokumen	100%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32 dokumen	32 dokumen	100%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	10 paket	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0 Unit	12 Unit	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	32 Unit	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	13 Unit	13 Unit	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5823 Laporan	3500 Laporan	166%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JAse KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan (Dengan Satuan:unit)	41 unit	41 unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8 unit	8 unit	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	100%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 unit	110 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	110 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	50 unit	50 unit	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
	-Persentase Penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
	-persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	100 dok	100 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 dokumen	250 dokumen	100%
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 dok	12 dok	100%
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 dok	240 dok	100%
Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 dok	232 dok	100%
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 dok	42 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	36 laporan	36 laporan	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	7593 dok	8715 dok	87%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 org	42 org	100%
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 dok	4 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 dok	4 dok	100%
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 dok	3 dok	100%
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 org	110 org	100%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dok	12 dok	100%
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	100%
Pengelolaan dana darurat mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan: Porsen)	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 dok	112 dok	100%
Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dok	5 dok	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	112 laporan	100%
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	100%
Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 laporan	25 laporan	100%
Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 dok	36 dok	100%
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 laporan	20 laporan	100%
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2024 DAN 2023
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	17%	6.45%	264%
Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	594.572.48 6.657	508.005.38 2.734,83	117%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dok	3 dok	100%
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 laporan	110 laporan	100%
Pengolahan,pemel iharaan,dan pelaporan basis data pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60300 laporan	60300 laporan	100%
Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60143 dok	60143 dok	100%
Pengendalian,pem eriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 dok	480 dok	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Dari table 3.4 dapat kami jelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2024 dan 2023 dapat di baca dari hasil angka masing-masing kolom. Namun demikian untuk kegiatan yang di tahun 2024 tidak ada anggarannya dan di tahun 2023 ada anggarannya tidak kami hitung karena pembilangnya tidak ada capaian indikatornya kinerjanya otomatis tidak bisa dihitung atau

nol. Untuk rata rata capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan rata-rata tercapai 100 % (seratus persen) bahkan ada yang lebih diantaranya indikator Program Pengelolaan Pendapatan yaitu tingkat pertumbuhan PAD yang bisa mencapai 264% (dua ratus enam puluh empat persen dari tahun sebelumnya dan Indikataor Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Jumlah Pendapatan Daerah meningkat sebesar 117% (seratus tujuh belas persen dibanding tahun lalu hal ini disebabkan upaya keras yang dilakukan di tahun 2024 antara lain Optimalisasi penerimaan PBJT makanan dan Minuman dari Kegiatan yang bersumber dana desa, Optimasilasi Bersama Pemungutan Pembayaran listrik dan Sinergi penilaian jalan tol dengan KPP Pratama Demak namun ada pula indikator capaian kinerja yang mengalami penurunan di tahun 2024 dibanding tahun 2023 yaitu indikator sub kegiatan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait target 2024 sudah terealisasi 7.593 dari target 5000 atau 152 % sedangkan target tahun 2023 sebesar 8000 terealisasi 8.715 atau sebesar 108 %. Penurunan jumlah SP2D disebabkan karena target di 2024 memang diturunkan dari tahun sebelumnya karena di 2024 tidak ada SP2D tambah uang dan untuk Puskesmas GU (ganti uang) gabung dengan Dinas Kesehatan dan tidak ada SP2D nihil. Karena targetnya diturunkan secara otomatis capainnya pun turun. Namun secara prosentase capaian tahun 2024 lebih tinggi. Capaian target realisasi tahun ini turun bukan karena kinerjanya turun, namun semata-mata karena adanya aturan yang baru sehingga target diturunkan sehingga capaian otomatis turun. Dan untuk capaian di tahun 2024 untuk program ini rata-rata tercapai sehingga dikategorikan sangat baik.

**MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 dan Tahun 2023**

Tabel 3.5
**Perbandingan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun
2024 dan 2023**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah daerah	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%

PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET KINE RJA 2024	REALI SASI KINER JA 2024	TARG ET KINE RJA 2023	REALI SASI KINER JA 2023	PERBAND INGAN REALISA SI KINERJA 2022 DAN 2023
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:dokumen(LK Tahunan)	1 doku men	1 dokum en	1 doku men	1 dokum en	100%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangan nya (Dengan Satuan:OB)	48 OB	48 OB	48 OB	48 OB	100%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 OB	85 OB	85 OB	85 OB	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket	85 Paket	85 Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 org	85 org	85 org	85 org	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	48 org	48 org	48 org	48 org	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	62 Paket	62 Paket	62 Paket	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	100%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	100%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0 paket	10 paket	10 paket	0%
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0 Unit	0 Unit	12 Unit	12 Unit	0%
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Laporan	5.823 Laporan	340 Laporan	3.311 Laporan	175%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JAsa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan (Dengan Satuan:unit)	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	110 unit	110 unit	110 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	366 unit	366 unit	366 unit	366 unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
	-Persentase Penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
	-persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	100%
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 dok	240 dok	240 dok	240 dok	100%
Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 dok	232 dok	232 dok	232 dok	100%
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 dok	42 dok	42 dok	42 dok	100%

PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET KINE RJA 2024	REALI SASI KINER JA 2024	TARG ET KINE RJA 2023	REALI SASI KINER JA 2023	PERBAND INGAN REALISA SI KINERJA 2022 DAN 2023
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 lap	36 lap	36 lap	36 lap	100%
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 dok	7593 dok	8000 dok	8715dok	87%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 org	42 org	42 org	42 org	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%
Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 org	110 org	110 org	110 org	100%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Pengelolaan dana darurat mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 dok	112 dok	112 dok	112 dok	100%
Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 dok	125 dok	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 dok	125 dok	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%
Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	112 laporan	112 laporan	112 laporan	100%
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 laporan	25 laporan	25 laporan	25 laporan	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 dok	36 dok	36 dok	36 dok	100%
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	5%	17%	5%	6,45%	264 %
Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	526.609.633.341	594.572.486,65	461.751.167.860	508.005.380.734,83	117%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2024	TARGET KINERJA 2023	REALISASI KINERJA 2023	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DAN 2023
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 laporan	110 laporan	110 laporan	110 laporan	100%
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60300 laporan	60300 laporan	60300 laporan	60300 laporan	100%
Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60143 dok	60143 dok	60143 dok	60143 dok	100%
Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 dok	480 dok	480 dok	480 dok	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2023 sesuai Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 ada 4 program 14 kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan rincian masing-masing Program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 Pada Program ini ada 8 kegiatan 30 sub kegiatan dengan Indikator kinerja Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan target 2024 adalah 100% tercapai 100% sedangkan Target kinerja Tahun 2023 adalah 100% telah tercapai 100% pula Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada program ini ada 4 kegiatan 19 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2024 dengan indikator program Persentase penetapan APBD tepat waktu target tepat waktu tercapai tepat waktu, Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP target 100% tercapai 100% dan Persentase penyampaian LKPD tepat waktu tercapai tepat waktu. Untuk capaian tahun 2023 capaian indikatornya juga sama. Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pada program ini ada 1 kegiatan 11 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2024 adalah 100% telah tercapai 100% sedangkan Target kinerja Tahun 2023 adalah 100 telah tercapai 100% pula. Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

4. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pada program ini ada 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2024 adalah Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan: Persen) Target 5% telah tercapai 17 % sedangkan Target kinerja Tahun 2023 adalah 5% telah tercapai 6,45 %. Untuk tahun 2024 target sudah tercapai dengan sangat baik bahkan melampaui target hal ini karena upaya yang dilakukan dalam menggali potensi pendapatan yang baru menuai hasil yang sangat signifikan diantaranya yaitu Optimalisasi penerimaan PBJT makanan dan Minuman dari Kegiatan yang bersumber dana desa, Optimasilasi Bersama Pemungutan Pembayaran listrik dan Sinergi penilaian jalan tol dengan KPP Pratama Demak

MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 dan TAHUN 2023

Tabel. 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Prosentase (%) Realisasi 2024 dan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2023	2023	2024	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	85	88,32	90,25	90.30	102%
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsi	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82	82,01	82,5	NA	NA
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPA	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%	102,50	100%	102,63%	100,13 %
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	18,5	21,02	18	22	104,66%
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Indek Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2024 dengan target 90,25 dan realisasi sebesar 90,30 sedangkan untuk tahun 2023 dari target sebesar 85 terealisasi sebesar 88,32 hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 ada peningkatan realisasi dari 88,32 menjadi 90,30 sebesar 1,98 point atau 102% dari angka realisasi tahun sebelumnya hal ini sesuai harapan bahwa realisasi capaian pelayanan dari tahun ke tahun harus semakin meningkat dan ketercapaian ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan layanan dengan cara menindaklanjuti dan melakukan perbaikan layanan dan kemudahan dalam pemberian layanan diantaranya dengan melakukan inovasi layanan di bidang pendapatan dengan aplikasi SIPANDA, peningkatan layanan di bidang Perbendaharaan dan Akuntansi seperti diluncurkannya buku SAKU dan aplikasi SIAP UJI
- **Sasaran Strategis 2 :** Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif *dengan target indikator kinerja* Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2024 dengan target 100% tercapai 100% sedangkan untuk tahun 2023 dari target sebesar 100% tercapai 100% pula, hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran kedua 2 tahun berturut-turut bisa mencapai target yang ditetapkan capaian ini termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini tak lepas dari pemberian respon yang cepat kepada masyarakat terhadap keluhan yang terjadi sebagai contoh adanya keluhan dari masyarakat yang tertimpa papan reklame dijembatan kracaan yang menimpa seorang pengendara kendaraan bermotor dan hari itu juga dari bidang pendapatan langsung mengontak ke vendor yang memasang papan reklame untuk memperbaiki dan mendatangi rumah pengendara motor yang tertimpa papan reklame sekaligus memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan untuk biaya pengobatan dan perbaikan kendaranya, sekaligus memberi peringatan kepada vendor agar melak

- **Sasaran Strategis 3:** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* Nilai SAKIP BPKPAD. Tingkat capaian pada tahun 2024 dari target 82,5 sampai dengan laporan ini ditulis nilai belum keluar sehingga belum bisa dibandingkan. Sedangkan untuk pembandingnya sendiri pada tahun 2023 dari target 82 telah tercapai 82,01.
- **Sasaran Strategis 4 :** Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target. Tingkat capaian pada tahun 2024 dengan target 100 tercapai 102,63 sedangkan untuk tahun 2023 dari target 100 tercapai 102,50 . Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 ada peningkatan capaian kinerja sebesar 0,13 poin atau 100,13 % dibandingkan tahun sebelumnya . Capaian ini dalam kategori sangat baik. Ketecapaian ini tak lepas dari dukungan masing masing sasaran yang mana Kerjasama tim sangat diperlukan, karena rata rata capaian diperoleh dari jumlah realisasi keseluruhan sasaran strategis sebagai pembilang dibagi dengan jumlah sasaran strategis OPD sehingga ketidak tercapaian disalah satu sasaran akan berdampak kurang baik terhadap jumlah realisasi keseluruhan dan sebaliknya capaian target yang melebihi target akan berdampak bagus terhadap capaian secara keseluruhan terhadap hasil rata rata.
- **Sasaran Strategis 5 :** Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* hasil opini BPK. Tingkat capaian baik target 2024 maupun 2023 tercapai dengan sangat baik yaitu target WTP tercapai WTP pula dan capaian ini pada tahun 2024 merupakan capaian WTP yang ke-8. Hal ini bagi pemerintah Kabupaten Demak merupakan suatu kebanggaan, harapannya tahun-tahun berikutnya pun WTP dapat dipertahankan dengan kualitas yang lebih bagus lagi tanpa ada catatan.

- **Sasaran Strategis 6** : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal untuk sasaran ke-6 ini memiliki 3 indikator kinerja. Yang pertama Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan untuk tahun 2024 maupun 2023 dari target 100% tercapai 100% hal ini menunjukkan capaian 2 tahun terakhir dalam kategori sangat baik. Untuk indikator yang kedua yaitu Derajat Otonomi Fiskal pada tahun 2024 dari target 18 tercapai 22 atau 122% hal ini menunjukkan capaian kinerjanya dalam kategori sangat baik sedangkan target tahun 2023 dari target 18,5 tercapai 21,02 atau 113,62% hal ini menunjukkan capaian kinerja di tahun 2023 dalam kategori sangat baik pula dan pada tahun 2024 ada peningkatan capaian sebesar 0,98 poin dari tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa BPKPAD dari tahun ke tahun ada peningkatan kinerjanya. Dan untuk indikator yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dari target 100% baik tahun 2023 maupun 2022 semua tercapai 100%, hal ini menunjukkan 2 tahun terakhir capaian kinerja dalam kategori sangat baik.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN RPJMD

Tabel.3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021-2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		Kondisi Akhir
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	84,5	84,5	84,75	85,705	85	88,32	85,50	90,30	-	-	-	-	85,705
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	81,54	81,54	81,75	81,66	82	82,01	82,5	82,15	-	-	-	-	81,66
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	100%	100%	100%	101,53%	100%	102,50%	100%	102,63	-	-	-	-	101,53 %
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP

6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%
		17,25	17,25	17,35	17,8	17,55	21,02	17,65	22%	-	-	-	-	17,8
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Bahwa realisasi tahun 2024 untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian BPKPAD TAHUN 2024 adalah sebesar 90,30 atau 106% jika dilihat dari target RENSTRA sebesar 85,50 dan target RPJMD 85,50 angka perolehan 90,30 atau 106% merupakan angka yang sudah melebihi target dengan kategori sangat memuaskan. Target Renstra dan target RPJMD untuk targetnya adalah sama namun untuk target Renja RKPD di perubahan 2024 ada perubahan target menjadi sebesar 90,25 dan dengan demikian jika dibandingkan target RKPD perubahan 2024 sebesar 90,25 capaian 90,30 persentasenya adalah 100,05

Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target RENSTRA tahun 2024 dan RKPD perubahan 2024 adalah 100% sedangkan target RPJMD tidak ada. Untuk capaian target indikator ini dapat tercapai dengan baik dengan kategori sangat memuaskan.

Untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu Nilai SAKIP BPKPAD, target RPJMD, RENSTRA maupun RKPD BPKPAD 2024 adalah sebesar 82,5 sampai dengan laporan ini ditulis nilai sakip secara resmi belum keluar sehingga belum bisa dibandingkan karena jika dibandingkan hasilnya tentu belum menunjukkan realitas yang sesungguhnya karena pembelingny masih belum ada nilainya atau nol. Selanjutnya indikator kinerja yang keempat yaitu Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target, target RENSTRA yaitu sebesar 100%, capaian BPKPAD 2024 adalah sebesar 102,63 % hal ini menandakan bahwa capaian target indikator dapat tercapai dengan baik dan dalam kategori sangat memuaskan. Selanjutnya Indikator kinerja yang kelima yaitu hasil opini dari BPK dimana pada tahun 2024 ini Pemkab Demak mendapatkan opini WTP yang menunjukkan bahwa target indikator telah tercapai dengan baik dan dalam kategori sangat memuaskan. Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah. Kemudian indikator yang keenam yaitu Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan dengan hasil capaian 100% dari target 100% sehingga capaian ini masuk dalam kategori sangat memuaskan Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah. Indikator kinerja yang ketujuh yaitu Derajat Otonomi Fiskal dengan capaian kinerja sebesar 22 dari target Renstra sebesar 17,65 dan target RKPD Perubahan 2024 sebesar 18, dari capaian target Renstra maupun RKPD perubahan yang

mencapai 122 %. Capaian ini dalam kategori sangat memuaskan. Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah.

Yang terakhir yaitu indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dengan hasil kinerja 100% dari target 100% yang menandakan bahwa capaian kinerja dalam kategori sangat memuaskan. Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak belum ada Standar Nasional yang mengaturnya.

5. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN PROPINSI

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Propinsi tidak ada kegiatan yang langsung turunan dari Propinsi karena BPKPAD merupakan unsur penunjang sehingga tidak ada realisasi kegiatan yang menjadi standar propinsi.

6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara keseluruhan kinerja BPKPAD tahun 2024 rata - rata telah terealisasi sebesar 102,63% dari target 100% angka ini masuk dalam kategori sangat baik. Adapun penyebab keberhasilan dalam penanganan permasalahan di tahun 2023 yang telah kami tindaklanjuti di 2024 yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain permasalahan ketercapaianya pertumbuhan PAD dan Derajat Otonomi Fiskal dapat kami uraian berikut :

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan sehingga dalam membiayai program dan kegiatan bisa tercukupi dengan anggaran yang memadai. Selain itu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Demak masih banyak dibiayai dari sumber pendapatan dari pemerintah pusat atau bersumber dari dana Perimbangan.
2. Masih ada wajib pajak yang tidak taat pajak

Adapun kegiatan yang telah dilakukan guna mendukung keberhasilan untuk penyelesaian permasalahan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2023 di 2024 adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan BPKPAD Kabupaten Demak selaku Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan untuk peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dikabupaten Demak adalah dengan meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah melalui inovasi akselerasi peningkatan pendapatan daerah sebagai berikut :

a. Optimalisasi penerimaan PBJT makanan dan Minuman dari Kegiatan yang bersumber dana desa.

Kegiatan yang dilakukan yaitu penyampaian surat pemberitahuan dan pendataan obyek PBJT atas makanan dan Minuman dari Kegiatan di Desa yang bersumber dana desa sehingga semua belanja makan minum yang ber sumber dari dana desa harus dikenakan PBJT atas makanan dan minuman sebesar 10% sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil dari kegiatan optimalisasi tersebut adalah sebanyak 105 desa / kelurahan dari 249 desa/kelurahan yang telah menyetorkan PBJT atas makanan dan minuman yang bersumber dari dana desa dengan nominal penerimaan sebesar Rp.824.980.958,00. Dari penerimaan tersebut dapat meningkatkan penerimaan PBJT atas makanan dan minuman sebesar 6,49% dibanding tahun sebelumnya

b. Optimasilasi Bersama Pemungutan Pembayaran listrik

Optimasilasi Bersama Pemungutan Pembayaran listrik melalui kerjasama dengan PLN dilakukan dengan melibatkan BPKPAD, DISHUB dan DINPUTARU. Kegiatan optimalisasi tersebut di tuangkan dalam perjanjian kerjasama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Litstrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor 0020.Pj/KEU.01.06/F03140000/2023 dan 415.4/68/PKS/XII/2023. Kegiatan optimasilasi Bersama Pemungutan Pembayaran listrik tersebut mampu meningkatkan PBJT atas tenaga

listrik sebesar Rp. 11.374.966.910,- atau 17,30 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Sinergi penilaian jalan tol dengan KPP Pratama Demak

Penilaian Jalan Tol di Kabupaten Demak telah dilakukan pada tahun 2024 bekerjasama dengan KPP Pratama Demak. Adanya kegiatan penilaian Jalan Tol tersebut mampu meningkatkan penerimaan PBB – P2 dari obyek Jalan Tol sebesar Rp. 4.800.186.400,- atau sebesar 7,25% dari penerimaan pokok PBB – P2 tahun 2024

Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di kabupaten Demak adalah dengan memaksimalkan penerimaan piutang pajak daerah melalui penagihan piutang dan meningkatkan kualitas pengelolaan dengan menyusun Peraturan – peraturan Kepala daerah sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan PDRD di kabupaten Demak. Peraturan Kepala daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Perbup no 21 tahun 2024 tentang 21 Nomor 21 Tahun 2024 Pedoman Teknis Retribusi Sewa Barang Milik Daerah
- 2) Perbup no 24 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Daerah
- 3) Perbup no 42 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Daerah
- 4) Perbup no 43 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Milik Pemerintah Daerah
- 5) Perbup no 54 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga
- 6) Perbup no 55 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah
- 7) Perbup no 56 tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 8) Perbup no 57 tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Daerah
- 9) Perbup no 59 tahun 2024 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Sewa Gedung Pendidikan Dan Pelatihan
- 10) Perbup no 63 tahun 2024 tentang tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tgl 30 Des 2024

2. Upaya yang telah dilakukan BPKPAD Kabupaten Demak untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah di Kabupeten Demak adalah sebagai berikut :
- a. Mengintensifkan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Kegiatan penagihan pajak DAERAH dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan, tagihan / teguran pajak daerah dan penagihan langsung ke wajib pajak. Pada tahun 2024 jumlah Wajib pajak yang diberikan surat tagihan beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak Yang Diberikan Surat Tagihan

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH SURAT TAGIHAN YANG DISAMPAIKAN	JUMLAH YANG DI TIDAKLANJUTI	PROSENTASE TINDAK LANJUT STP DIBANDING YANG SEHARUSNYA
1	PAJAK AIR TANAH	137	39	28.47%
2	PAJAK REKLAME	149	67	44.97%
3	PBB - P2	321.108	34.932	10.88%
4	PAJAK PARKIR	1	-	0,00%
5	PAJAK RESTORAN	1	-	0,00%
JUMLAH		321.396	27.938	10.90%

Keterangan : Surat tagihan untuk PBB – P2 melalui SPPT tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa dengan mengintensifkan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah maka dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak sebesar 10.90 % dari jumlah wajib pajak / obyek pajak yang memiliki piutang (tidak taat pajak).

- b. Pemberian sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang menunggak pajak daerah

Pemberian sanksi / denda dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak dibayar setelah melebihi jatuh tempo pembayaran. Pada tahun 2024 sampai dengan bulan 31 Desember 2024 terdapat penerimaan sanksi berupa denda pajak sebagai berikut :

Tabel 2.
Jumlah wajib pajak yang diberikan surat tagihan

NO	TAHUN PAJAK	JUMLAH PENERIMAAN DENDA
1	2017	28.928.755
2	2018	31.934.140
3	2019	53.378.760
4	2020	73.753.063
5	2021	110.836.353
6	2022	141.728.388
7	2023	122.632.815
JUMLAH		563.192.274

Dari tabel diatas menunjukan bahwa Pemberian sanksi / denda dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.

c. Melakukan kegiatan Penertiban Pajak Daerah

Penertiban obyek pajak yang sudah dilakukan yaitu pada obyek pajak reklame dan PBJT Parkir. Penertiban pajak reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak yaitu dengan menempel stiker belum/tidak lunas pajak bagi reklame permanen dan membongkar obyek pajak reklame yang insidentil atau non permanen. Sedangkan untuk PBJT parkir yang telah dilakukan penertiban dengan penempelan stiker belum lunas pajak yaitu sebanyak 61 obyek pajak. Pada tahun 2024 reklame yang ditertibkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Jumlah wajib pajak yang dilakukan penertiban

No	Jenis Obyek Pajak yang di tertibkan	Jumlah Obyek Pajak yang ditertibkan	Jumlah Obyek yang dibayar setelah penertiban
1	Reklame Permanen	126 Obyek Pajak	34 Obyek Pajak
2	Reklame Permanen non	566 Obyek pajak	-
3	PBJT parkir	61 Obyek Pajak	Proses tindak lanjut

Tabel diatas terlihat bahwa pemberian sanksi dengan melakukan penertiban obyek pajak, dan telah dilakukan penertiban obyek pajak reklame sebanyak 126 Obyek pajak reklame permanen dan 566 Obyek pajak non permanen. Dari penertiban pajak tersebut sebanyak 34 obyek pajak melakukan pembayaran setelah adanya penertiban pajak daerah. Sedangkan untuk PBJT Parkir telah dilakukan penertiban pajak dengan menempel stiker belum lunas pajak untuk 61 obyek pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kegiatan penertiban pajak daerah akan meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

1. Upaya yang dilakukan terhadap sulitnya mencari bukti dukung yang kuat dan lengkap atas kepemilikan tanah dengan yaitu dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPN, pemangku wilayah (Desa/Kelurahan), Dinputaru dan OPD terkait lainnya dalam mencari data atau bukti dukung terkait kepemilikan tanah.
2. Upaya yang dilakukan terhadap kesulitan menunjuk titik-titik batas tanah yang harus diambil menggunakan GPS dengan cara Dengan melibatkan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut, koordinasi dengan OPD terkait seperti Desa/Kelurahan, BPN dalam menentukan batas tanah.
3. Upaya yang dilakukan terhadap belum optimalnya strategi penagihan sewa terhadap penyewa yang kurang sadar akan kewajibannya yaitu dengan cara:
 1. Memberikan pemahaman secara lebih intensif kepada seluruh penyewa terkait pentingnya ketepatan pembayaran sewa.
 2. Melibatkan OPD lain guna mendukung penagihan sewa BMD (SATPOL PP)
6. Upaya yang dilakukan terhadap Intensitas Pergantian Pegurus Barang yang terlalu sering dengan cara Melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Aset BMD melalui Sosialisasi Pra Rekon setiap 2 tahun sekali
7. Upaya yang dilakukan terhadap Kapasitas Pengurus barang yang terbatas dengan cara Meningkatkan kemampuan SDM pada Pengurus Barang terutama dalam informasi Pengelolaan BMD

7. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA MANUSIA

Efisiensi sumber daya di BPKPAD Kabupaten Demak dapat dilihat dari jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Pada bulan Desember tahun 2024 Jumlah pegawai BPKPAD Kabupaten Demak tercatat sebanyak 50 orang terdiri dari laki – laki 29 orang (55%) dan perempuan 24 orang (45%). Sebagian besar pegawai berpendidikan S1 (40%) sesuai dengan tabel berikut.

Tabel. 3.8
Pegawai BPKPAD berstatus ASN Kabupaten Demak Menurut Unit Kerja dan
Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	SEK/BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3/SM	S-1	S-2	S-3	
1	SEKRETARIAT	-	-	2	2	2	4	-	10
2	PERBENDAHARAAN AKUNTANSI	-	-	2	3	2	3	-	10
3	ANGGARAN	-	-	-	-	3	4	-	7
4	ASET DAERAH	-	-	1	1	5	3	-	10
5	PENDAPATAN	-	-	3	1	9	3	-	16
JUMLAH (ORANG)		-	-	8	7	21	17	-	53
Persentase (%)		-	-	15	13	40	32	-	100

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa pegawai di BPKPAD sangat terbatas jumlahnya. Dari jumlah 53 (lima puluh tiga) orang tersebut 17 (tujuh belas) orang adalah pejabat struktural/ analis sedangkan sisanya atau 36 (tiga puluh enam) orang adalah staf/pelaksana. Untuk staf/pelaksana kebanyakan ada di Bidang Pendapatan. Hal ini sungguh sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja di BPKPAD yang sangat banyak. Kebutuhan ideal pegawai di BPKPAD sesuai pemetaan jabatan ada di kisaran 112 (seratus dua belas) orang dan hanya dicukupi oleh jumlah pegawai ASN sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan untuk mencukupi kebutuhan itu saat ini dibantu tenaga honorer sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dan BPKPAD masih memerlukan PNS yang berkedudukan sebagai arsiparis, Jabatan Fungsional Perencana Anggaran, Jabatan Fungsional Analisis Pendapatan, jabatan penata keuangan, jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan, jabatan pengelola daftar gaji, jabatan analisis perbendaharaan, jabatan pengadministrasi pajak, jabatan analis pendapatan daerah, jabatan pengolah pemanfaatan barang milik daerah, dan jabatan JFT pranata komputer .

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut di atas perlu pengelolaan Sumber Daya Manusia secara maksimal. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada maka kiranya dalam penambahan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak perlu memilih pegawai yang memiliki latar belakang pekerjaan atau disiplin ilmu pengelolaan keuangan daerah dan pajak daerah hal ini akan mempermudah dan mempercepat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing masing bidang tugas yang di emban. Dalam rangka mengatasi kondisi kurangnya sumber daya manusia BPKPAD mengambil langkah dengan mengikutsertakan karyawan/karyawati dalam BinteK-BinteK dan Pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah. Kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan system akuntansi dan IT Based System yang lebih rumit maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mengerti IT serta aplikasi Sistem Informasi Keuangan yang handal yang terintegrasi dari proses perencanaan e-planning, penganggaran e-budgeting dan penatausahaan SIPD Penatausahaan dan aplikasi SIPANDA.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki BPKPAD Kabupaten Demak berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional organisasi sehingga perlu dipelihara dan diamankan mencakup ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara umum jumlah dan kondisi sarana dan prasarana BPKPAD sudah cukup baik dan memadai.

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program kegiatan yang mendukung tercapainya tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

8.1 Analisis program kegiatan

Tabel.3.9

Pencapaian Kinerja Program

NO	PROGRAM	KEGIATAN	% Rata-Rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		100	89,98	10,02	111,14
		Perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	89,45	10,55	111,79
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	90,57	9,43	110,41
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	95,00	5	105,26
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	92,69	7,31	107,89
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	84,57	15,43	118,25

NO	PROGRAM	KEGIATAN	% Rata-Rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95,76	4,24	104,43
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	64,30	35,7	155,52
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92,73	7,27	107,84
2	PROGRAM PENGEL OLAAAN KEUANGAN DAERAH		100	99,40	0,6	100,60
		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	91,93	8,07	108,78
		Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	91,44	8,56	109,36
		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	93,55	6,45	106,89
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	99,44	0,56	100,56

NO	PROGRAM	KEGIATAN	% Rata-Rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100	87,24	12,76	114,63
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	87,24	12,76	114,63
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		340	94,58	245,42	359,48
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	113	94,58	18,42	119,48

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*, serta terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Singkatnya efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara *input* dan *output*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

Efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa *output* yang dihasilkan oleh sebagian besar organisasi sektor publik bersifat tidak terwujud dan tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

Analisis Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 89,98%, tingkat efisiensi 10,02%, dan tingkat efektivitas 111,14%. Analisis Capaian kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 89,45%, tingkat efisiensi 10,55%, dan tingkat efektivitas 111,79%. Analisis Capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 90,57%, tingkat efisiensi 9,43%, dan tingkat efektivitas

110,41%. Analisis Capaian kegiatan Administrasi barang milik daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 95%, tingkat efisiensi 5%, dan tingkat efektivitas 105,26%. Analisis Capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 92,69%, tingkat efisiensi 7,31%, dan tingkat efektivitas 107,89%. Analisis Capaian kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 84,57%, tingkat efisiensi 15,43%, dan tingkat efektivitas 118,25%. Analisis Capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 95,76%, tingkat efisiensi 4,34%, dan tingkat efektivitas 104,43%. Analisis Capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 64,3%, tingkat efisiensi 35,7%, dan tingkat efektivitas 155,52%. Analisis Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 92,73%, tingkat efisiensi 7,27%, dan tingkat efektivitas 107,84%.

Analisis Capaian kegiatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 99,40%, tingkat efisiensi 0,60%, dan tingkat efektivitas 100,60%. Analisis Capaian kegiatan Koordinasi dan penyusunan anggaran daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 91,93%, tingkat efisiensi 8,07%, dan tingkat efektivitas 108,78%. Analisis Capaian kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 91,44%, tingkat efisiensi 8,56%, dan tingkat efektivitas 109,36%. Analisis Capaian kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 93,55%, tingkat efisiensi 6,45%, dan tingkat efektivitas 106,89%. Analisis Capaian kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 99,44%, tingkat efisiensi 0,56% dan tingkat efektivitas 100,56%.

Analisis Capaian program pengelolaan barang milik daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 87,24%, tingkat efisiensi 12,76%, dan tingkat efektivitas 114,63%. Analisis Capaian kegiatan dalam program ini hanya ada satu kegiatan dan nama kegiatan yang sama

dengan nama Program serta target yang sama otomatis capaian rata-rata kinerja penyerapan anggaran, tingkat efisiensi dan efektivitas sama dengan di program.

Analisis Capaian program pengelolaan pendapatan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 340%, penyerapan anggaran sebesar 94,58%, tingkat efisiensi 245,42%, dan tingkat efektivitas 359,48%.

Untuk program ini hanya ada satu kegiatan dengan nama yang sama. Analisis Capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah ini indikatornya berbeda dengan indicator program. Dalam indicator program adalah Tingkat pertumbuhan PAD sedangkan indicator kegiatan adalah jumlah PAD. Untuk capaian indicator kegiatan tingkat capaian rata-rata kinerja 113%, penyerapan anggaran sebesar 94,58%, tingkat efisiensi 18,42%, dan tingkat efektivitas 119,48%.

Tabel 3.10

8.2 Analisis sasaran, program yang mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	100,05	89,98	10,07	111,19
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	100	89,98	10,02	111,14
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Belum Keluar	99,40	NA	NA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	Semua Program di BPKPAD	102,63	98,68	3,95	104
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	Semua Program di BPKPAD	100	98,68	1,32	101,34
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	99,40	0,6	100,60
		2.Derajat Otonomi Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	122	94,58	27,42	128,99
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	87,24	12,76	114,63

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*, serta terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Singkatnya efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara *input* dan *output*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

Efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa *output* yang dihasilkan oleh sebagian besar organisasi sektor publik bersifat tidak terwujud dan tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

Analisis Capaian Indikator Kinerja yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian indikator kinerja adalah sebesar 100,05 dan tingkat penyerapan anggaran sebesar 89,98%, tingkat efisiensi 10,07%, dan tingkat efektivitas 111,19%.

Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%, tingkat penyerapan anggaran sebesar 89,98%, tingkat efisiensi 10,02%, dan tingkat efektivitas 111,14%.

Untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu Nilai SAKIP BPKPAD, capaian indikator kinerja adalah sampai dengan laporan ini disusun belum keluar sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,4%, sehingga tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas belum bisa diukur.

Selanjutnya yakni indikator kinerja yang keempat yaitu Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target, capaian Indikator kinerja yaitu sebesar 102,63%. tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,68%, tingkat efisiensi 3,95%, dan tingkat efektivitas 104%.

Indikator kinerja yang kelima yaitu hasil opini BPK dimana BPKPAD mendapatkan capaian WTP tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,63%, tingkat efisiensi 1,32%, dan tingkat efektivitas 101,34%.

Kemudian indikator yang keenam yaitu Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan dengan hasil capaian 100% tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,40%, tingkat efisiensi 0,60%, dan tingkat efektivitas 100,60%.

Indikator kinerja yang ketujuh yaitu Derajat Otonomi Fiskal dengan capaian kinerja sebesar 122 tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,58%, tingkat efisiensi 27,42%, dan tingkat efektivitas 128,99%.

Yang terakhir yaitu indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dengan hasil kinerja 100% dari target 100% yang menandakan bahwa capaian kinerja dalam kategori sangat memuaskan. tingkat penyerapan anggaran sebesar 87,24%, tingkat efisiensi 12,76%, dan tingkat efektivitas 114,63%.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DPPA Pada tahun anggaran 2024, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan 4 program 14 kegiatan 66 sub kegiatan dengan total anggaran belanja Rp. **468.921.975.793,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp. 462.743.675.988** atau sebesar 98,68 % dengan Program/Kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.1

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.680.000	34.600.000	89,45
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan	14.405.000	13.608.500	94,47
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.710.000	3.502.000	94,39
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.565.000	5.029.500	90,38
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	12.460.000	83,07
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.937.518.130	14.434.890.809	90,57
		5 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15.217.828.530	13.767.543.457	90,47
		6 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	719.689.600	667.347.352	92,73

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.960.000	3.762.000	95
		7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.960.000	3.762.000	95
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	426.471.000	395.280.065	92,67
		8 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24.300.000	23.895.000	98,33
		9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	359.852.000	329.498.465	91,56
		10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	42.319.000	41.886.600	98,98
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.109.385	494.808.106	84,57
		11 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28.303.600	27.838.700	98,36
		12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	157.088.500	146.813.000	93,46
		13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.105.000	38.389.900	93,39
		14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	9.723.285	6.745.000	69,37
		15 Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.025.000	44.135.500	43,26
		16 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200.000.000	191.990.006	96
		17 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.544.000	17.700.000	86,16
		18 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.320.000	21.196.000	80,53

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.153.000	197.405.000	95,76
		19 Pengadaan Mebel	0	0	0
		20 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0		0
		21 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	206.153.000	197.405.000	95,76
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	446.400.000	287.017.203	64,3
		22 Penyediaan jasa surat menyurat	6.400.000	6.400.000	100
		23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	440.000.000	280.617.203	63,78
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.035.234.425	960.023.927	92,73
		24 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.719.715	125.092.551	92,85
		25 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	123.411.900	89.721.253	72,7
		26 Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.425.000	95
		27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.800.000	93,33
		28 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	470.483.291	459.728.762	97,71
		29 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	291.343.519	276.806.361	95,01
		30 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10.776.000	4.450.000	41,3
		JUMLAH I	18.679.525.940	16.807.787.110	99,4

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	935.995.000	860.463.550	91,93
		1 Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	88.952.500	88.645.750	99,66
		2 Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	82.657.500	82.222.500	99,47
		3 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	339.605.000	307.621.300	90,58
		4 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	299.695.000	273.922.000	91,4
		5 Koordinasi dan penyusunan regulasi kebijakan bidang anggaran	125.085.000	108.052.000	86,38
		Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	362.160.000	331.165.973	91,44
		6 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	90.000.000	64.876.483	72,08
		7 Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	10.000.000	10.000.000	100
		8 Koordinasi,fasilitasi,asistensi,sinkronisasi,supervise,monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	24.000.000	23.765.500	99,02
		9 Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah,laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	13.000.000	13.000.000	100
		10 Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	185.160.000	180.608.932	97,55

NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
				ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
		11	Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	40.000.000	38.915.058	97,29
		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah		637.840.000	596.703.613	93,55
		12	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo dan beban	57.217.000	49.947.500	87,29
		13	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	192.064.000	179.247.413	93,33
		14	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	319.154.000	307.243.450	96,27
		15	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	30.955.000	22.671.500	73,24
		16	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	950.000	843.750	88,82
		17	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	37.500.000	36.750.000	98
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		416.885.036.500	414.533.208.361	99,44
		18	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	415.885.036.500	414.533.208.361	99,67
		19	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	1.000.000.000	0	0
		JUMLAH II		418.821.031.500	416.321.541.497	87,24

NO	PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
				ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.400.000.000	1.221.380.500	87,24
		1	Penyusunan standar harga	7.700.000	7.567.000	98,27
		2	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	3.340.000	3.320.500	99,42
		3	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	205.000	185.500	90,49
		4	Penatausahaan barang milik daerah	10.600.000	10.300.000	97,17
		5	Inventarisasi barang milik daerah	5.400.000	4.800.000	88,89
		6	Pengamanan barang milik daerah	985.800.000	867.760.000	88,03
		7	Penilaian barang milik daerah	55.300.000	50.745.000	91,76
		8	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	109.615.000	70.363.000	64,19
		9	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	10.250.000	10.110.000	98,63
		10	Penyusunan laporan barang milik daerah	7.720.000	6.948.000	90
		11	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	204.070.000	189.281.500	92,75
			JUMLAH III	1.400.000.000	1.221.380.500	87,24
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah		30.021.418.353	28.392.966.881	94,58
		1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.629.763.800	1.013.216.380	62,17
		2	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1.008.212.500	909.408.750	90,2
		3	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	136.727.000	97.670.000	71,43
		4	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	400.440.000	383.050.000	95,66
		5	Penetapan wajib pajak daerah	3.341.021.700	2.792.944.499	83,6
		6	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	23.505.253.353	23.196.677.252	98,69
			JUMLAH IV	30.021.418.353	28.392.966.881	94,58
			JUMLAH I + II + III + IV	468.921.975.793	462.743.675.988	98,68

Sumber: Data BPKPAD bulan Desember 2024

Dari uraian tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah telah mampu terealisasi sebesar 98,68 % dan angka tersebut termasuk kategori capaian sangat tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2024 diukur dengan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 telah melampaui target yang ditentukan sebagaimana dalam perjanjian kinerja 2024 pada kategori **sangat baik**.

Kemudian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan rata-rata prosentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai 98,68% atau dengan kategori **sangat baik**.

Pelaksanaan Program / kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Jumlah pendapatan asli daerah dari target Rp. 526.609.633.341,- terealisasi sebesar 594.572.486.657 atau 113%
2. Pemberian hadiah percepatan pembayaran PBB-P2 tahun 2024 bagi wajib pajak pembayar tercepat.
3. Optimalisasi penerimaan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan Minuman dari Kegiatan yang bersumber dana desa.

4. Optimasiasi Bersama Pemungutan Pembayaran listrik melalui kerjasama dengan PLN dilakukan dengan melibatkan BPKPAD, DISHUB dan DINPUTARU di kuatkan dalam perjanjian kerjasama antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak
5. Pengurangan sangsi administrasi berupa denda PBB-P2 sebagai upaya memotivasi wajib pajak melunasi hutang pajak.
6. Jemput bola pembayaran pajak daerah pada hari libur.
7. Pemanfaatan system keamanan barcoding pada id-billing dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
8. Pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Penyampaian SPPT PBB-P2 dapat didownload melalui e – SPPT pada Sipanda.
10. Penilaian kembali obyek PBB-P2.
11. Verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (pemutakhiran data piutang) pajak daerah.
12. Pendataan dan pemutakhiran data pada obyek pajak reklame dan pajak air tanah.
13. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dikirim ke BPK Perwakilan Jawa Tengah tepat waktu dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di 2024.
14. Sinergi penilaian jalan tol dengan KPP Pratama Demak mampu meningkatkan penerimaan PBB – P2 dari obyek Jalan Tol.
15. Selama 10 tahun terakhir Perda APBD dapat ditetapkan tepat waktu. Antara lain Perda APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan tanggal 30 Desember 2014. Perda APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 pada tanggal 23 Desember 2015. Kemudian APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 ditetapkan tanggal 23 Desember 2016 APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 APBD tahun 2019 ditetapkan dengan Perda Nomor 17 tahun 2018 pada tanggal 21 Desember 2018. APBD tahun 2020 ditetapkan dengan Perda Nomor 16 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019. APBD tahun 2021 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2020 pada tanggal 29 Desember 2020. APBD tahun 2022 ditetapkan dengan Perda APBD Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021. APBD tahun 2023 ditetapkan dengan Perda APBD Nomor:

11 tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022. APBD tahun 2024 ditetapkan dengan Perda APBD No. 13 tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023. APBD tahun 2025 ditetapkan dengan Perda APBD No. tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024.

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Aset dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
2. Belum adanya aplikasi pemanfaatan BMD
3. Masih terjadi kelebihan bayar gaji pegawai ASN
4. Pencatatan transaksi tidak tepat waktu
5. Penggunaan Aplikasi Berbasis Web (SIPD) yang tidak dikelola oleh pemerintah
6. Belum maksimalnya penerimaan PBJT makanan dan minuman atas kegiatan di desa (yang bersumber dari dana desa)
7. Belum maksimalnya penerimaan Pajak Air tanah dan pajak reklame sehingga tidak terpenuhinya target pendapatan tahun 2024)
8. Adanya tren peningkatan Piutang PBB-P2 yang selalu meningkat tiap tahun.
9. Belum maksimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah secara digital (masih ada beberapa jenis retribusi yang di pungut secara tunai)

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

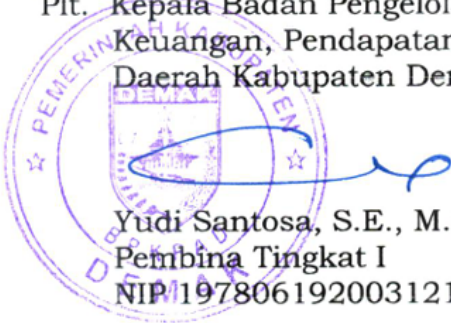
Strategi yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Melaksanakan percepatan pensertifikatan tanah milik Pemkab dan koordinasi yang intensif dengan BPN, Dinputaru, dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan proses pensertifikatan tanah
2. Perencanaan penggunaan Aplikasi Pemanfaatan Aset berbasis web serta Meningkatkan kemampuan SDM pada Bidang Aset terutama dalam bidang teknologi informasi.
3. Bekerja sama dengan TASPEN terkait perencanaan penggunaan SIM Gaji berbasis Web
4. Memberikan sanksi terhadap SKPD yang belum menyelesaikan penatausahaan
5. Penyesuaian jam kerja dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi penatausahaan dan perbendaharaan

6. Memaksimalkan penerimaan PBJT makanan dan minuman atas kegiatan di desa (yang bersumber dari dana desa) bersinergi dengan Inspektorat dan Dinpermasdes P2KB untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan pajak daerah. Belum maksimalnya penerimaan PBJT makanan dan minuman atas kegiatan di desa (yang bersumber dari dana desa).
7. Strategi yang dilakukan dalam memaksimalkan pengelolaan pajak air tanah dan pajak reklame sehingga tidak terpenuhinya target pendapatan melalui :
 - 1) Penguatan regulasi dan penyusunan SOP penertiban wajib pajak yang tidak taat membayar pajak
 - 2) Pendataan obyek pajak air tanah baru terutama dari PAMSIMAS / BPSPAMS dan pelaku usaha lainya yang memanfaatkan air tanah
 - 3) Pendataan semua titik reklame di wilayah Kabupaten Demak
 - 4) Penertiban obyek reklame yang terbengkelai untuk dilakukan pembongkaran atau dimasukan ke aset pemda
 - 5) Penertiban obyek pajak air tanah yang tidak taat pajak
8. Memaksimalkan fungsi petugas pungut tingkat desa / kelurahan melalui :
 - 1) Adanya evaluasi dan pembinaan secara berkala kepada Kepala desa/lurah dan atau petugas pungut di tingkat desa yang penerimaanya rendah dengan melibatkan Inspektorat dan Dinpermasdes P2KB.
 - 2) Pemberian teguran dan/atau sanksi kepada petugas pungut tingkat desa / kelurahan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemungutan PBB – P2
 - 3) Penguatan database PBB – P2 melalui pendataan dan penilaian ulang terintegrasi secara sistemik dan sistematis
9. Memaksimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah secara digital (masih ada beberapa jenis retribusi yang di pungut secara tunai)
Strategi yang dilakukan adalah :
 - 1) memaksimalkan peran petugas pungut PBB – P2 tingkat desa / kelurahan untuk mensukseskan penerimaan pajak secara digital dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kemudahan pembayaran secara digital.
 - 2) Memperluas digitalisasi daerah untuk jenis – jenis retribusi daerah yang belum digital

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak di masa yang akan datang.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Demak,



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007